



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

==PERUBAHAN== RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS TENAGA KERJA

JL. PEMUDA NO. 55A MOJOSARI, MOJOKERTO 61382 JAWA TIMUR
TELP. (0321) 592192 FAX. (0321) 593581

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45/14 /KEP/416-107/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan, dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara berkesinambungan dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan ke II Tahun berkenaan
- BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB IV : Penutup
- LAMPIRAN
- KETIGA** : Uraian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 14 /KEP/416-107/2023
TANGGAL 29 September 2023

MATRIKS PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	Kab. Mojokerto	5.121.614.600					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi							
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%		13.315.000					
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		7.500.000					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 Dokumen		3.750.000					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 Dokumen		3.750.000					
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		5.815.000					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan					4 Dokumen		1.959.000					
	Penyusunan Dokumen LKjIP					1 Dokumen		1.928.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 Dokumen		1.928.000					
	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan					1 Laporan		-					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.691.063.600					
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 orang/bln		4.691.063.600					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					36 Orang/bln		2.149.736.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Orang/bln		2.093.910.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Orang/bln		89.268.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Orang/bln x 12		358.149.600					
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		10 dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan admonistrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-					
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%		-					
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1 Paket		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas					1 Paket		-					
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		120.636.000					
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket		30.036.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket		30.036.000					
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		5 Paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					5 Paket		8.600.000					
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 Paket		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan					13 Paket		20.000.000					
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket		30.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan bahan/ material ATK					1 Paket		30.000.000					
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan		32.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas					100 Laporan		32.000.000					
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%		187.600.000					
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan		70.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Komunikasi					12 Bln		6.218.806					
	Pembiayaan Jasa Air					12 Bln		-					
	Pembiayaan Jasa Listrik					12 Bln		63.781.194					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan		117.600.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 Laporan		117.600.000					
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100%		109.000.000					
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		44.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor					6 unit		40.350.000					
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 unit		3.650.000					
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor					1 unit		50.000.000					
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		15 Unit		15.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor					15 Unit		15.000.000					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%		75.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		1 dokumen		75.000.000					
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1 Dokumen		75.000.000					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					1 Dokumen		75.000.000					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25%	Kab. Mojokerto	1.223.100.000					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		144 Orang		1.137.800.000					
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		128 Orang		1.087.800.000					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer					32 orang		169.950.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias					16 Orang		87.950.000					
	Pelatihan Operator Alat Berat					16 Orang		92.950.000					
	Pelatihan Tata Boga					16 Orang		61.950.000					
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)												
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)					16 Orang		200.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)					16 Orang		245.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)					16 Orang		230.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Transmigrasi					3 Orang		90.000.000					
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		10 Orang		37.150.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					10 Orang		37.150.000					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%		138.600.000					
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		45 Orang		138.600.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair					20 Stand		100.000.000					
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja					50 Lembaga		38.600.000					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang		21.600.000					
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang		21.600.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		21.600.000					
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		30 orang		42.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		30 orang		42.000.000					
	RINCIAN :												
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA					30 orang		42.000.000					
2.07.05	Program Hubungan Industrial				Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	Kab. Mojokerto	1.897.075.800					
					Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%							
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%		1.897.075.800					
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					60 Orang		30.000.000					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					30 Orang		50.000.000					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					40 Orang		50.000.000					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Kegiatan		50.000.000					
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara		25.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					10 Perkara		25.000.000					
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					1 Lembaga		45.000.000					
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27900 Orang		1.647.075.800					
	RINCIAN :												
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					40 Orang		51.018.750					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					40 Orang		46.018.750					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					50 Orang		66.018.750					
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan					30 Orang		16.018.750					
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)					27740 Orang		1.468.000.800					
	JUMLAH							8.646.140.400					

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,


BAMBANG PURWANTO



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan nantinya akan dituangkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dimana terdapat (lima) program yang terdiri dari 3 (Tiga Program Prioritas) dan 2 (dua) program pendukung.

Harapan kami semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu perubahan indikatif Tahun 2023.

Mojokerto, September 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO, SH., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690521 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM..... 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU 7

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD 7

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 17

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH..... 18

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD..... 19

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN..... 35

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 35

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 35

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN..... 38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 49

BAB V PENUTUP..... 62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 3 yaitu *“Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah”*, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Perubahan Renja OPD ditetapkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian P- RKPD tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n.

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto membuat Perubahan Renja yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu

Perubahan Renja ini menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026;
 28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto:

a. Maksud :

1. menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan,
2. menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan
3. serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Tujuan :

Tujuan disusunnya perubahan Rencana kerja adalah sebagai perwujudan dokumen perumusan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan pada tahun N sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang perubahan Renja Perangkat Daerah, Proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara RENJA PD dengan dokumen RKPD, RENSTRA PD, RENJA K/L dan RENJA PROVINSI, Tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 pada umumnya dapat tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dan disajikan pada tabel pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

RINCIAN CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			99,10%	72,08%
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		100%	98,75%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	98,75%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,68%
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		100%	69,67%
			Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	100%	69,61%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	94,79%
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	90,9%	90,92%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	99,77%
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	90,9%	96,40%
			Penyediaan Bahan / Material	100%	99,99%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	100%	94,09%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	88,73%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	79,48%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	98,51%
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	88,73%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	96,83%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	100%	99,79%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	100%	100%
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			79,44%	62,86%
		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI		75,75%	59,35%
			Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	75,75%	59,35%
		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA		100%	73,06%
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	73,06%
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			105,2%	64,30%
		PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	67,42%
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	100%	80,26%
			Pelayanan Antar Kerja	100%	45,81%
			Perluasan Kesempatan Kerja	100%	84,80%
		PENGLOLAAN INFORMASI PASAR KERJA		0%	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERSENTASE REALISASI TARGET	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
			Job Fair/ Bursa Kerja	0%	0%
		PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	99,64%
			Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,64%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			104,5%	84,20%
				100%	
		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		87,22%	84,20%
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72,35%	97,98%
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%	81,33%
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	50%	67,53%
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100%	75,81%

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Program ini terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan, untuk pencapaian kinerja sebesar 99,10%, sementara persentase realisasi anggaran sebesar 72,08%

2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Indikator dari program ini adalah persentase peningkatan pencari kerja yang dilatih. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 62,68% dan realisasi capaian kinerja sebesar 79,44%. Program ini terdiri dari 2 (dua) dan 2 (dua) sub kegiatan.

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Indikator dari program penempatan tenaga kerja adalah persentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja pada perusahaan. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 64,30% mengalami penurunan daripada tahun 2020 sebesar 71,54% dikarenakan anggaran direfocusing, akan tetapi untuk realisasi capaian kinerja sebesar 15,79% dari target 15% yang ditentukan pada Rencana Kerja Tahun 2021. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan.

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Indikator program hubungan dari program hubungan industrial adalah persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor. Pada tahun 2021 realisasi capaian keuangan sebesar 84,20% mengalami penurunan daripada tahun 2020 sebesar 95,0% dan ini dikarenakan dampak dilakukannya refocusing anggaran pelaksanaan kegiatan. Namun untuk realisasi kinerja sebesar 104,05% dari indikator Persentase Kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan Persentase perusahaan yang dimonitor sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selanjutnya pencapaian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada Tabel TC-29.

TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2018)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1) 2020	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2/ 2019)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N- 2/2019)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2				3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)
1					URUSAN WAJIB								
1	14				KETENAGAKERJAAN								
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	300%	100%	100%	100%	100%	500%	500%
					PERSENTASE REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH								
					INDEKS PROFESIONALITAS ASN PERANGKAT DAERAH								
					PERSENTASE INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH YANG TERCAPAI								
					INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT/ APARATUR TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN DINAS TENAGA KERJA								

2	07	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN YANG TERSUSUN	5 dokumen	15	4	4	100 %	4	23	4,60
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersedia	3 dokumen	9	2	2	100 %	2	13	4,33
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Informasi Dan Data Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	1 dokumen	3	1	1	100 %	1	5	5,00
						Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan	1 dokumen	3	1	1	100 %	1	5	5,00
2	07	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN	26 bulan	78	26	26	100 %	26	130	5,00
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Waktu Pembiayaan Gaji Dan Tunjangan	14 bulan	42	14	14	100 %	14	70	5,00
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN KETATAUSAHAAN DAN KEPEGAWAIAN YANG TERSUSUN	131 kegiatan	393	131	131	100 %	131	655	5,00
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	11 kegiatan	33	11	11	100 %	11	55	5,00
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Makanan Dan Minuman	6 kegiatan	18	6	6	100 %	6	30	5,00
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan	13 kegiatan	39	13	13	100 %	13	65	5,00
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Pengadaan Bahan / Material Alat Tulis Kantor	1 kegiatan	3	1	1	100 %	1	5	5,00

2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Rapat-Rapat Dan Konsultasi Ke Luar Dan Dalam Daerah	100 kegiatan	300	100	100	100 %	100	500	5,00
2	07	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24 bulan	72	24	24	100 %	24	120	5,00
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Pembiayaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Jasa Tenaga Kerja Non Asn	12 bulan	36	12	12	100 %	12	60	5,00
2	07	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37 dokumen	111	37	37	100 %	37	185	5,00
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan	6 kendaraan	18	6	6	100 %	6	30	5,00
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1 kegiatan	3	1	1	100 %	1	5	5,00
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan	30 unit	90	30	30	100 %	30	150	5,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN PENCARI KERJA YANG DILATIH	70%	55%	60%	62%	103%	70%	187%	267%

2	07	03	2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	JUMLAH PENCAKER YANG DILATIH BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	132	232	212	212	100 %	144	588	4,45
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Ketenagakerjaan Sesuai Klaster Kompetensi	132 orang	232	212	212	100 %	144	588	4,45
2	07	03	2.02		PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA	JUMLAH LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (PENGELOLA) YANG DIBERIKAN PEMBINAAN	25 Lembaga	40	15	15	100 %	10	65	2,60
						JUMLAH PESERTA PEMBINAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI	10 perusahaan	10	10	10	100 %	10	30	3,00
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lpk Swasta Yang Dibina	25 Lembaga	40	15	15	100 %	10	65	2,60
						Jumlah Peserta Pembinaan Pemagangan Dalam Negeri	10 perusahaan	10	10	10	100 %	10	30	3,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENINGKATAN JEJARING INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA PERUSAHAAN	15%	124,40%	14%	17%	121%	14%	155%	1036%
2	07	04	2.01		PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENCARI KERJA YANG DIBERIKAN FASILITASI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	20 orang	120	40	40	100 %	20	180	9,00
						JUMLAH DOKUMEN PENDUKUNG PELAYANAN ANTAR KERJA	1 dokumen	3	1	1	100 %	0	4	4,00
						JUMLAH KK TRANSMIGRAN DAN CALON LOKASI TRANS YANG LAYAK HUNI UNTUK KAB. MOJOKERTO	3 KK	14	5	3	60 %	3	20	6,67

2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Dokumen Pendukung Penyediaan Sumber Daya Pada Pelayanan Antar Kerja	1 dokumen	3	1	1	100 %	0	4	4,00
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kk Transmigran Dan Calon Lokasi Trans Yang Layak Huni Untuk Kab. Mojokerto	3 KK	14	5	3	60 %	3	20	6,67
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencaker Yang Mendapatkan Fasilitas Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	120	40	40	100 %	20	180	9,00
2	07	04	2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	JUMLAH PESERTA PENYULUHAN / PENYEBARLUASAN BURSA TENAGA KERJA	300 orang	210	90	90	100 %	300	600	2,00
						JUMLAH STAND/ PERUSAHAAN PENYEDIA INFORMASI LOWONGAN KERJA	40 stand	40	30	30	100 %	30	100	2,50
2	07	04	2.03	03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan / Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	300 orang	210	90	90	100 %	300	600	2,00
						Jumlah Stand / Perusahaan Penyedia Informasi Lowongan Kerja	40 stand	40	30	30	100 %	30	100	2,50
2	07	04	2.05		PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ORANG YANG DIBERIKAN PEMBINAAN PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA	50 orang	150	60	60	100 %	0	210	4,20
2	07	04	2.05	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Peserta Yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan Imta	50 orang	150	60	60	100 %	0	210	4,20

2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DISELESAIKAN	82%	95%	80%	86%	108%	82%	263%	321%
						PERSENTASE PERUSAHAAN YANG DIMONITOR	75%	0	0	0	0	70%	0,7	93%
2	07	05	2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ORANG YANG DIBERIKAN FASILITASI PEMBINAAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HI	210 orang	390	265	265	100 %	0	655	3,12
						PERSENTASE KEIKUTSERTAAN RAPAT PEMBINAAN HI	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300	3,00
						JUMLAH PENANGANAN PERSELISIHAN HI	30 penanganan	80	30	30	100 %	14	124	4,13
						JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIBERIKAN FASILITASI PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA	200 perusahaan	470	115	115	100 %	95	680	3,40
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Diberikan Fasilitas Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hi	210 orang	390	265	265	100 %	0	655	3,12
						Jumlah Rapat Usulan Umk Serta Umk	7 rapat	21	7	7	100 %	4	32	4,57
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Perselisihan Hi	30 penanganan	80	30	30	100 %	14	124	4,13
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Pemberdayaan Lks Tripartit	4 rapat	8	2	2	100 %	0	10	2,50
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Peserta Yang Diberikan Fasilitas Pembinaan Perlindungan Tenaga Kerja	200 perusahaan	470	115	115	100 %	95	680	3,40

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang telah dirumuskan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, antara lain:

- 1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja;
- 2. Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten;
- 3. Persentase tingkat perselisihan hubungan industrial di perusahaan;
- 4. Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja dalam Jaminan Sosial.

Target dan realisasi pencapaian dari 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel TC-30.

TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PERSENTASE PENYERAPAN TENAGA KERJA			82%	84%			82%	84%	
2	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG BERKUALITAS DAN KOMPETEN			85%	85%			85%	85%	
3	PERSENTASE TINGKAT PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN			6%	5%			6%	5%	
4	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM JAMINAN SOSIAL			5%	6%			5%	6%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja diantaranya sebagai berikut:

NO	ISU -ISU	KENDALA DAN TANTANGAN	REKOMENDASI
1	Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);	Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di bawah target yang dicanangkan yaitu 3,45%, sementara pencapaian angka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,68%. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya penduduk usia angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia industri dan wirausaha, sehingga sulit bersaing di pasar bebas baik di level lokal/ daerah dan luar Daerah serta kekurangsiapan menghadapi era industri 4.0	Bahwa perlunya Pelatihan yang berbasis ketrampilan dan sertifikasi dalam berbagai sektor usaha terhadap pencari kerja yang dengan bentuk uji kompetensi agar pencari kerja/ tenaga kerja tersebut mampu bersaing di level lokal/ daerah dan luar daerah khususnya kesiapan dalam menghadapi era industri 4.0. Selain itu meningkatkan penyuluhan bursa kerja serta informasi kerja ke dalam bentuk bursa kerja serta mengadakan pembinaan serta perluasan kesempatan kerja dengan berkoordinasi dengan para perusahaan agar dapat membuka sektor pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja secara optimal
2	Kurangnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan	1. Masih banyaknya perusahaan-perusahaan di wilayah kabupaten Mojokerto yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan yang baik dan benar termasuk penyediaan sarana dan prasarana keselamatan kerja K3 yang belum merata di perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto; 2. Minimnya angka Tenaga Kerja yang diikut sertakan ke dalam Program Jaminan Sosial (Cth. BPJS) Ketenagakerjaan sebagai fasilitas wajib dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja;	1. Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi penerapan norma kerja, sosialisasi penerapan sarana dan prasarana keselamatan kerja (K3) di perusahaan dalam bentuk monitoring secara langsung dan berkala sebagai sarana hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan dinamis di wilayah Kabupaten Mojokerto; 2. Bahwa perlu dimaksimalkan pembinaan maupun sosialisasi agar perusahaan diwilayah Kabupaten Mojokerto mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk preventif secara langsung untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menciptakan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja bagi pekerja di tempat kerjanya;
3	tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto	Tingginya angka Perselisihan Hubungan Industrial antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja;	Bahwa dengan banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto sebagai

			contoh isu yang paling banyak terjadi adalah tingginya angka Upah Minimum Kerja, sehingga banyak perusahaan yang mencoba untuk bertahan atau survive dengan cara mengurangi jumlah karyawan maka pemutusan hubungan kerja massal atau penutupan perusahaan sebagai cara yang terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak pengusaha agar dapat terus menjalankan perusahaannya tidak dapat terhindarkan lagi. Maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Mojokerto dalam hal ini akan mengupayakan secara maksimal pendekatan secara sosialisasi maupun pembinaan hubungan industrial dalam bentuk klasikal atau ke perusahaan agar setiap perselisihan yang terjadi dapat terselesaikan di tingkat perusahaan secara bipartit
4	Kurangnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlunya pembinaan dan monitoring secara berkelanjutan terhadap perlindungan dan fasilitasi tCalon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari proses dan tata cara pemberangkatan, selama bekerja dan setelah hubungan kerja berakhir (pemulangan)
5	Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Fasilitasi Transmigrasi	Fasilitasi transmigrasi masih belum dijadikan solusi peningkatan kesejahteraan bagi masy. Mojokerto	1. terbatasnya kuota calon transmigran; 2. Kurangnya sosialisasi dan pembinaan ke masyarakat terhadap fasilitasi transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review Rancangan RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhan riil Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terdapat pada tabel TC-31.

TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
	KETENAGAKERJAAN					KETENAGAKERJAAN					
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Disnaker Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	5.532.980.100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Disnaker Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	5.121.614.600	
			Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi				Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	13.315.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target	100%	13.315.000	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	3.750.000	
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	3.750.000	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	3.750.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.815.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.815.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 Dokumen	1.959.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 Dokumen	1.959.000	
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	1.928.000	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	1.928.000	
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	1.928.000	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	1.928.000	
	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan			1 Laporan	-	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan			1 Laporan	-	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	5.102.429.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4.691.063.600	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	5.102.429.100	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang/bln	4.691.063.600	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bln	2.423.697.167	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bln	2.149.736.000	Sesuai hasil rekon BPKAD (12-06-23)
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Orang/bln	2.173.150.167	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Orang/bln	2.093.910.000	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Orang/bln	147.432.166	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Orang/bln	89.268.000	
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Orang/bln x 12	358.149.600	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Orang/bln x 12	358.149.600	39 OPD, 18 Kec

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	10 dokumen	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja	75%	-	
2.07.01.2.02.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	-	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			1 Paket	-	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			1 Paket	-	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	120.636.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	100%	120.636.000	
2.07.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	30.036.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	30.036.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	30.036.000	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	30.036.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	8.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	8.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			5 Paket	8.600.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			5 Paket	8.600.000	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	13 Paket	20.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 Paket	20.000.000	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 Paket	20.000.000	
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah paket bahan/ material yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 Paket	30.000.000	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 Paket	30.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	32.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	32.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 Laporan	32.000.000	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 Laporan	32.000.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	187.600.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100%	187.600.000	
2.07.01.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 Bln	6.218.806	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 Bln	6.218.806	
	Pembiayaan Jasa Air			12 Bln	-	Pembiayaan Jasa Air			12 Bln	-	
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 Bln	63.781.194	Pembiayaan Jasa Listrik			12 Bln	63.781.194	
2.07.01.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	117.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	117.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	117.600.000	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	117.600.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	109.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik	100%	109.000.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	44.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	44.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	40.350.000	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	40.350.000	
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	3.650.000	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	3.650.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 unit	50.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 unit	50.000.000	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	30 Unit	15.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	15.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			30 Unit	15.000.000	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			15 Unit	15.000.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Disnaker Kab. Mojokerto	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	75.000.000	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Disnaker Kab. Mojokerto	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%	75.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	75.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun	1 dokumen	75.000.000	
2.07.02.2.01.0 1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	75.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			1 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			1 Dokumen	75.000.000	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25%	1.223.100.000	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25%	1.223.100.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	176 Orang	1.137.800.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi	176 Orang	1.137.800.000	
2.07.03.2.01.0 1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang	1.087.800.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160 Orang	1.087.800.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer			32 orang	169.950.000	Pelatihan dan sertifikasi Komputer			32 orang	169.950.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias			16 Orang	87.950.000	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias			16 Orang	87.950.000	
	Pelatihan Operator Alat Berat			16 Orang	92.950.000	Pelatihan Operator Alat Berat			16 Orang	92.950.000	
	Pelatihan Tata Boga			16 Orang	61.950.000	Pelatihan Tata Boga			16 Orang	61.950.000	
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)					Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)					
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)			16 Orang	200.000.000	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)			16 Orang	200.000.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)			16 Orang	245.000.000	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)			16 Orang	245.000.000	
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)			16 Orang	230.000.000	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)			16 Orang	230.000.000	
2.07.03.2.01.0 2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 Lembaga	50.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	16 Lembaga	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			16 Orang	50.000.000	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			16 Orang	50.000.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 Lembaga	35.300.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	30 Lembaga	35.300.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 Lembaga	35.300.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 Lembaga	35.300.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	17.650.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	17.650.000	
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	17.650.000	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	17.650.000	
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	4 Perusahaan	50.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 Perusahaan	50.000.000	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 Perusahaan	50.000.000	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	329.350.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Mojokerto	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	329.350.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	127.150.000	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%	127.150.000	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 Orang	90.000.000	Pelayanan Antar Kerja		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 Orang	90.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Fasilitasi Transmigrasi			3 Orang	90.000.000	Fasilitasi Transmigrasi			3 Orang	90.000.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	10 Orang	37.150.000	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	10 Orang	37.150.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			10 Orang	37.150.000	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			10 Orang	37.150.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	138.600.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%	138.600.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	45 Orang	138.600.000	Job Fair / Bursa Kerja		Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	45 Orang	138.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Job Fair		Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair	20 Stand	100.000.000	Job Fair		Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair	20 Stand	100.000.000	
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja		Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	50 Lembaga	38.600.000	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja		Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	50 Lembaga	38.600.000	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	21.600.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang	21.600.000	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	21.600.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	21.600.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	21.600.000	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	21.600.000	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	30 orang	42.000.000	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	30 orang	42.000.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	30 orang	42.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	30 orang	42.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			30 orang	42.000.000	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			30 orang	42.000.000	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	1.897.075.800	Program Hubungan Industrial	Kab. Mojokerto	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	1.897.075.800	
		Kab. Mojokerto	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%			Kab. Mojokerto	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%		
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	1.897.075.800	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota		Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%	1.897.075.800	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.05.2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara	180.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000	
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000	
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			40 Orang	50.000.000	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			40 Orang	50.000.000	
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000	
2.07.05.2.02.0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	25.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000	
2.07.05.2.02.0 4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	45.000.000	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			1 Lembaga	45.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			1 Lembaga	45.000.000	

KODE	PERUBAHAN-RKPD 2023					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27900 Orang	1.647.075.800	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27900 Orang	1.647.075.800	
	RINCIAN :					RINCIAN :					
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			40 Orang	51.018.750	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			40 Orang	51.018.750	
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			40 Orang	46.018.750	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			40 Orang	46.018.750	
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			50 Orang	66.018.750	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			50 Orang	66.018.750	
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			30 Orang	16.018.750	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			30 Orang	16.018.750	
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	1.468.000.800	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	1.468.000.800	
	JUMLAH				9.057.505.900	JUMLAH				8.646.140.400	

2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bahwa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana dapat dilihat pada Tabel TC-32

TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2023 KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026, maka diperoleh hasil telaah sebagai berikut:

- **Visi**

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong

- **Misi**

Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

- **Tujuan**

Meningkatkan pedayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja serta sebagai upaya menurunkan pengangguran

- **Sasaran**

1. Meningkatnya kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
2. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatnya efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial;
4. Meningkatnya efektifitas pengawasan di bidang norma ketenagakerjaan;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas nasional tersebut maka disusun program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, Dinas Tenaga Kerja Melaksanakan Misi Ke 2 “**Membangun Kemandirian Ekonomi**

Berdimensi Kerakyatan". Sementara Tujuannya adalah **"Penurunan Angka Pengangguran"** dan mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

- 1. *Meningkatnya kualitas tenaga kerja serta penciptaan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja;***
- 2. *Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan kondusif serta optimalisasi perlindungan ketenagakerjaan***

Berikut ini ditampilkan Tabel 3.2.1 sebagai pedoman sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto.

TABEL 3.2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Penurunan Angka Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	5,62	5,42	5,09	4,76	4,43	4,10
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70,00 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)	71,00 (BB)	71,50 (BB)	72,00 (BB)	72,50 (BB)
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Serta Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Yang Berkualitas Dan Kompeten	85%	85%	85%	85%	87%	90%	90%
			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	82%	82%	82%	84%	84%	85%	86%
		Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial Yang Harmonis, Dinamis Dan Kondusif Serta Optimalisasi Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial Di Perusahaan		6%	6%	5%	5%	4%	4%
			Persentase Perusahaan Yang Mengikutsertakan Pekerja Dalam Jaminan Sosial		5%	5%	6%	6%	7%	8%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan.

Adapun program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel TC – 33.

TABEL TC-33
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	KETENAGAKERJAAN								
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	84,40 (A)	5.121.614.600	APBD		84,40 (A)	5.388.570.100
		Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan		2 Inovasi				2 Inovasi	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%	13.315.000			100%	14.646.500
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	7.500.000			2 Dokumen	8.250.000
	RINCIAN :								
	Dokumen Rencana Kerja APBD			1 Dokumen	3.750.000			1 Dokumen	4.125.000
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD			1 Dokumen	3.750.000			1 Dokumen	4.125.000
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan	5.815.000			4 Laporan	6.396.500
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribulan			4 Dokumen	1.959.000			4 dokumen	2.154.900

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen LKjIP			1 Dokumen	1.928.000			1 dokumen	2.120.800
	Penyusunan Dokumen SAKIP			1 Dokumen	1.928.000			1 dokumen	2.120.800
	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan			1 Laporan	-			1 Laporan	-
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%	4.691.063.600			90%	4.914.964.000
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 orang/bln	4.691.063.600			36 orang/bln	4.914.964.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/bln	2.149.736.000			36 Orang/bln	2.364.709.600
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)			36 Orang/bln	2.093.910.000			36 Orang/bln	2.093.910.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN			36 Orang/bln	89.268.000			36 Orang/bln	98.194.800
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan			5527 Orang/bln x 12	358.149.600			5527 Orang/bln x 12	358.149.600
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan admnistrasi pelaksanaan tugas ASN		10 dokumen	-			10 dokumen	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan admonistrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-			10 Dokumen	-
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%	-			75%	-
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1 Paket	-			1 Paket	-
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas			1 Paket	-			1 Paket	-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%	120.636.000			100%	132.699.600
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket	30.036.000			6 Paket	33.039.600
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			6 Paket	30.036.000			6 Paket	33.039.600
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		5 Paket	8.600.000			5 Paket	9.460.000
	RINCIAN :								
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			5 Paket	8.600.000			5 Paket	9.460.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 Paket	20.000.000			13 Paket	22.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan			13 Paket	20.000.000			13 Paket	22.000.000
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket	30.000.000			1 Paket	33.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan bahan/ material ATK			1 Paket	30.000.000			1 Paket	33.000.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan	32.000.000			100 Laporan	35.200.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas			100 Laporan	32.000.000			100 Laporan	35.200.000
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%	187.600.000			100%	206.360.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan	70.000.000			12 Laporan	77.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Komunikasi			12 Bln	6.218.806			12 Bln	6.840.687
	Pembiayaan Jasa Air			12 Bln	-				-
	Pembiayaan Jasa Listrik			12 Bln	63.781.194			12 Bln	70.159.313
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan	117.600.000			12 Laporan	129.360.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)			12 Laporan	117.600.000			12 Laporan	129.360.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100%	109.000.000			100%	119.900.000
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit	44.000.000			6 Unit	48.400.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	40.350.000			6 unit	44.385.000
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor			6 unit	3.650.000			6 unit	4.015.000
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	50.000.000			1 Unit	55.000.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor			1 unit	50.000.000			1 unit	55.000.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		15 Unit	15.000.000			30 Unit	16.500.000
	RINCIAN :								
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor			15 Unit	15.000.000			30 Unit	16.500.000
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja		100%	75.000.000			100%	82.500.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		1 dokumen	75.000.000			1 dokumen	82.500.000
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	82.500.000
	RINCIAN :								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja			1 Dokumen	75.000.000			1 Dokumen	82.500.000
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kab. Mojokerto	25%	1.223.100.000	APBD		25%	1.345.410.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		144 Orang	1.137.800.000			144 Orang	1.251.580.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		128 Orang	1.087.800.000			128 Orang	1.196.580.000
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer			32 orang	169.950.000			32 orang	186.945.000
	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias			16 Orang	87.950.000			16 Orang	96.745.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelatihan Operator Alat Berat			16 Orang	92.950.000			16 Orang	102.245.000
	Pelatihan Tata Boga			16 Orang	61.950.000			16 Orang	68.145.000
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)								
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)			16 Orang	200.000.000			16 Orang	220.000.000
	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)			16 Orang	245.000.000			16 Orang	269.500.000
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)			16 Orang	230.000.000			16 Orang	253.000.000
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		16 Lembaga	50.000.000			16 Lembaga	55.000.000
	RINCIAN :								
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK			16 Orang	50.000.000			16 Orang	55.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		30 Lembaga	35.300.000			30 Lembaga	38.830.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30 Lembaga	35.300.000			30 Lembaga	38.830.000
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			15 LPK	17.650.000			15 LPK	19.415.000
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri			15 Perusahaan	17.650.000			15 Perusahaan	19.415.000
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		4 Perusahaan	50.000.000			4 Perusahaan	55.000.000
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		4 Perusahaan	50.000.000			4 Perusahaan	55.000.000
	RINCIAN :								
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil			4 Perusahaan	50.000.000			4 Perusahaan	55.000.000
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	Kab. Mojokerto	72%	329.350.000	APBD		72%	362.285.000
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target		100%	127.150.000			100%	139.865.000
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		3 Orang	90.000.000			3 Orang	99.000.000
	RINCIAN :								
	Fasilitasi Transmigrasi			3 Orang	90.000.000			3 Orang	99.000.000
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja		10 Orang	37.150.000			10 Orang	40.865.000
	RINCIAN :								

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)			10 Orang	37.150.000			10 Orang	40.865.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Fasilitasi pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target		100%	138.600.000			100%	152.460.000
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja		45 Orang	138.600.000			45 Orang	152.460.000
	RINCIAN :								
	Job Fair	Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair		20 Stand	100.000.000			10 Stand	110.000.000
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja		50 Lembaga	38.600.000			50 Lembaga	42.460.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI		20 Orang	21.600.000			20 Orang	23.760.000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		20 Orang	21.600.000			20 Orang	23.760.000
	RINCIAN :								
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)			20 Orang	21.600.000			20 Orang	23.760.000
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA		30 orang	42.000.000			30 orang	46.200.000

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA		30 orang	42.000.000			30 orang	46.200.000
	RINCIAN :								
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA			30 orang	42.000.000			30 orang	46.200.000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Kab. Mojokerto	80%	1.897.075.800	APBD		80%	1.939.983.300
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		56%				56%	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target		100%	1.897.075.800			100%	1.939.983.300
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah		4 Perkara	180.000.000			4 Perkara	198.000.000
	RINCIAN :								
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto			60 Orang	30.000.000			60 Orang	33.000.000
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing			30 Orang	50.000.000			30 Orang	55.000.000
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial			40 Orang	50.000.000			40 Orang	55.000.000
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan			3 Kegiatan	50.000.000			3 Kegiatan	55.000.000
									-

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TAHUN 2023				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan		10 Perkara	25.000.000			10 Perkara	27.500.000
	RINCIAN :								
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial			10 Perkara	25.000.000			10 Perkara	27.500.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina		1 Lembaga	45.000.000			1 Lembaga	49.500.000
	RINCIAN :								
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit			1 Lembaga	45.000.000			1 Lembaga	49.500.000
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja		27900 Orang	1.647.075.800			160 Orang	1.664.983.300
	RINCIAN :								
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak			40 Orang	51.018.750			40 Orang	56.120.625
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja			40 Orang	46.018.750			40 Orang	50.620.625
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan			50 Orang	66.018.750			50 Orang	72.620.625
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan			30 Orang	16.018.750			30 Orang	17.620.625
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)			27740 Orang	1.468.000.800				1.468.000.800
	JUMLAH				8.646.140.400				9.118.748.400

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa perubahan rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan rekapitulasi Perubahan Renja tahun 2023 yang memuat usulan progam dan kegiatan Tahun 2023 kemudian disinkronisasikan melalui P.RKPD dengan pagu indikatif sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
MATRIKS PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR												
	KETENAGAKERJAAN												
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,40 (A)	Kab. Mojokerto	5.121.614.600					
					Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi							
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program dinas tenaga kerja yang tercapai sesuai target		100%		13.315.000					
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen		7.500.000					
	RINCIAN :												
	Dokumen Rencana Kerja APBD					1 Dokumen		3.750.000					
	Dokumen Rencana Kerja PAPBD					1 Dokumen		3.750.000					
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		5.815.000					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Dokumen Evaluasi tiap Tribunal					4 Dokumen		1.959.000					
	Penyusunan Dokumen LKjIP					1 Dokumen		1.928.000					
	Penyusunan Dokumen SAKIP					1 Dokumen		1.928.000					
	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan					1 Laporan		-					
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90%		4.691.063.600					
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		36 orang/bln		4.691.063.600					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN					36 Orang/bln		2.149.736.000					
	Tambahan Penghasilan ASN (TPP)					36 Orang/bln		2.093.910.000					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan obyektif lainnya ASN					36 Orang/bln		89.268.000					
	Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN seluruh OPD dan Kecamatan					5527 Orang/bln x 12		358.149.600					
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		10 dokumen		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-					
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks profesionalitas asn dinas tenaga kerja		75%		-					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.2.02.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1 Paket		-					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Pakaian Dinas					1 Paket		-					
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum perangkat daerah sesuai kebutuhan		100%		120.636.000					
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		6 Paket		30.036.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					6 Paket		30.036.000					
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		5 Paket		8.600.000					
	RINCIAN :												
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					5 Paket		8.600.000					
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		13 Paket		20.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Barang Cetak dan Penggandaan					13 Paket		20.000.000					
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah paket bahan/ material yang disediakan		1 Paket		30.000.000					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembiayaan bahan/ material ATK					1 Paket		30.000.000					
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100 Laporan		32.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rapat Perjalanan Dinas					100 Laporan		32.000.000					
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		100%		187.600.000					
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 Laporan		70.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Komunikasi					12 Bln		6.218.806					
	Pembiayaan Jasa Air					12 Bln		-					
	Pembiayaan Jasa Listrik					12 Bln		63.781.194					
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 Laporan		117.600.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Non ASN)					12 Laporan		117.600.000					
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik		100%		109.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		6 Unit		44.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor					6 unit		40.350.000					
	Pembiayaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Kantor					6 unit		3.650.000					
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi gedung kantor					1 unit		50.000.000					
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		15 Unit		15.000.000					
	RINCIAN :												
	Pembiayaan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor					15 Unit		15.000.000					
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja				Persentase program dan kegiatan yang mengacu perencanaan tenaga kerja	100%		75.000.000					
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			Jumlah Dokumen rencana tenaga kerja yang tersusun		1 dokumen		75.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		1 Dokumen		75.000.000					
	RINCIAN :												
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja					1 Dokumen		75.000.000					
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25%	Kab. Mojokerto	1.223.100.000					
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			Jumlah orang yang dilatih berdasarkan unit kompetensi		144 Orang		1.137.800.000					
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n		128 Orang		1.087.800.000					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan sertifikasi Komputer					32 orang		169.950.000					
	Pelatihan dan sertifikasi Tata Rias					16 Orang		87.950.000					
	Pelatihan Operator Alat Berat					16 Orang		92.950.000					
	Pelatihan Tata Boga					16 Orang		61.950.000					
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Peningkatan Keterampilan kerja) (DBHCHT)												
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan Sertifikasi Tata Rias Pengantin (DBHCHT)					16 Orang		200.000.000					
	Pelatihan dan Sertifikasi Menjahit (DBHCHT)					16 Orang		245.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan dan Sertifikasi Pembuatan Roti dan Kue (DBHCHT)					16 Orang		230.000.000					
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			Jumlah kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka optimaslisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n		16 Lembaga		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Pelatihan dan sertifikasi metodologi Instruktur LPK					16 Lembaga		50.000.000					
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina		30 Lembaga		35.300.000					
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		30 Lembaga		35.300.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta					15 LPK		17.650.000					
	Pembinaan Pemagangan dalam Negeri					15 Perusahaan		17.650.000					
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan yang diberikan konsultasi produktivitas		4 Perusahaan		50.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas		4 Perusahaan		50.000.000					
	RINCIAN :												
	Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil					4 Perusahaan		50.000.000					
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja			Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	72%	Kab. Mojokerto	329.350.000					
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	Persentase Fasilitas Pelayanan Antar Kerja Kab/ Kota yang tercapai sesuai target	100%		127.150.000					
2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja			Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	3 Orang		90.000.000					
	RINCIAN :												
	Fasilitasi Transmigrasi					3 Orang		90.000.000					
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	10 Orang		37.150.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)					10 Orang		37.150.000					
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	Persentase Fasilitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) yang tercapai sesuai target	100%		138.600.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja			Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	45 Orang		138.600.000					
	RINCIAN :												
	Job Fair			Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair	Jumlah Stand Perusahaan Peserta Job Fair	20 Stand		100.000.000					
	Penyuluhan Informasi Bursa Kerja			Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	Jumlah Peserta Penyuluhan Informasi Bursa Kerja	50 Lembaga		38.600.000					
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	Jumlah orang terfasilitasi perlindungan PMI	20 Orang		21.600.000					
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Jumlah CPMI/ PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang		21.600.000					
	RINCIAN :												
	Pembinaan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia)					20 Orang		21.600.000					
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	Jumlah orang peserta yang diberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA	30 orang		42.000.000					
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	Jumlah Orang Peserta yang Diberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	30 orang		42.000.000					
	RINCIAN :												

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA					30 orang		42.000.000					
2.07.05	Program Hubungan Industrial			Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	80%	Kab. Mojokerto	1.897.075.800					
				Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	56%							
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota			Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	Persentase fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang tercapai sesuai target	100%		1.897.075.800					
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Perselisihan yang dicegah	Jumlah Perselisihan yang dicegah	4 Perkara		180.000.000					
	RINCIAN :												
	Sosialisasi Upah Minimum Kab. Mojokerto					60 Orang		30.000.000					
	Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourcing					30 Orang		50.000.000					
	Harmonisasi Kelembagaan Hubungan Industrial					40 Orang		50.000.000					
	Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan					3 Kegiatan		50.000.000					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara		25.000.000					
	RINCIAN :												
	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial					10 Perkara		25.000.000					
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga		45.000.000					
	RINCIAN :												
	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit					1 Lembaga		45.000.000					
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	27900 Orang		1.647.075.800					
	RINCIAN :												
	Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak					40 Orang		51.018.750					
	Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja					40 Orang		46.018.750					
	Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan					50 Orang		66.018.750					
	Monitoring sarana dan prasarana di perusahaan					30 Orang		16.018.750					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, September 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690521 199602 1 001

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	BL	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
				OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan untuk petani tembakau dan Pekerja Rentan lainnya Melalui Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)					27740 Orang		1.468.000.800					
	JUMLAH							8.646.140.400					

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2023 yang akan datang.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Bahwa Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto 2021-2026.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 telah disesuaikan dengan kondisi Renstra 2021-2026 karena Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, September 2023
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO,



BAMBANG PURWANTO, SH., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690521 199602 1 001